

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran.

Suatu penelitian dengan judul KEPENTINGAN JEPANG TERHADAP INDONESIA 1958 – 1966 dilakukan dengan dasar pemikiran yang juga merupakan alasan penelitian sebagai berikut :

1.1 Peranan Internasional Jepang yang Dramatis.

Sebelum tahun 1945 Jepang belum pernah diduduki oleh bangsa lain. Kejayaan Jepang sebelum perang dunia II membawanya kepada aliansi dengan Jerman dan Itali, kemudian mencetuskan perang dunia II. Kekalahan Jepang pada perang ini sekaligus memadamkan peranan internasionalnya.

Kebangunan kembali Jepang mulai pada konferensi Perdamaian San Fransisco, September 1951, yang selanjutnya mulai dengan mengadakan hubungan – hubungan dengan Negara – Negara tetangga. Dengan Negara – Negara di Asia Tenggara, khususnya dengan Indonesia, hubungan kembali dijalin melalui perjanjian perdamaian yang didalamnya terdapat perjanjian pembayaran pampas an perang, melalui perundingan yang berlangsung dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1958.

Melihat peranan Jepang dalam poitik internasional pada masa lalu, kebangunan kembali Jepang merupakan perkembangan yang tak boleh diabaikan.

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jepang yang Menakjubkan.

Kekalahan Jepang pada perang dunia II hampir menghilangkan semuanya yang pernah dimiliki, kemerdekaan, kemakmuran, harga diri, posisi internasional, dan kepercayaan diri nasional, sehingga politik luar negerinya bertemakan pada usaha memperoleh kembali semuanya yang pernah dimiliki sejak memperoleh kembali salah satunya yaitu kemerdekaan.

Suatu keberhasilan nyata yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonominya yang fantastis mulai akhir tahun 1950-an dan seterusnya, yang oleh orang Jepang sendiri

sering dinamakan sebagai kecenderungan dari ‘binatang ekonomi (economical animal)’¹.

Kecenderungan ini sejalan dengan politik luar negerinya dalam berhubungan dengan Negara – Negara lain, termasuk Indonesia, yang perlu diwaspadai. Hubungan baik Jepang – Republik Indonesia dalam situasi kecenderungan Jepang semacam ini, menarik untuk dimengerti.

2. Perumusan Masalah.

Perjanjian perdamaian dan persetujuan pembayaran pampasan perang antara Jepang dan Indonesia ditandatangani pada tanggal 20 Januari 1958, dan hubungan diplomatic secara resmi dibuka pada tanggal 15 April 1958². Sejak saat itulah Republik Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama melalui proses pembayaran pampasan perang dalam bentuk bantuan tenaga – tenaga ahli dan barang – barang modal.

Hubungan Jepang – Republik Indonesia tahun 1958 – 1966 diliputi oleh perkembangan politik dalam negeri Indonesia yang belum menentu, yang dikarenakan oleh masalah – masalah dalam negeri maupun situasi Internasional saat itu, terutama situasi perang dingin (1947 – 1972) antara blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet.

Pemberontakan – pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950-an, masalah – masalah Irian Barat dan Malaysia yang terjadi pada tahun 1960-an mempengaruhi politik luar negeri Indonesia ‘bebas aktif’, sehingga Nampak mengalami pergeseran baik ke kiri maupun ke kanan. Pergeseran politik luar negeri Indonesia pada awal tahun 1960-an sampai berakhirnya pemerintahan Presiden Sukarno ke blok Komunis, mula – mula ke Uni Soviet kemudian ke China.

Jepang yang kalah dalam perang dunia II menghadapi masa pendudukan oleh tentara sekutu yang pada hakekatnya berarti pendudukan oleh tentara Sekutu yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas Mac Arthur yang

¹ Ishihara Shintaro, “Satu Bangsa Tanpa Moralitas”, dalam Yayasan Obor Indonesia (pentj.), *Kekuatan yang Membisu Kepribadian dan Peranan Jepang*, Penerbit Sinar Harapan bersama Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1981, hal. 46.

² Mashashi Nishihara, *The Japanese and Sukarno’s Indonesia Tokyo – Jakarta Relations 1951 – 1966*, The University Press of Hawaii, Honolulu, 1976, hal. 35.

menentukan hidup mati bangsa Jepang serta panjangnya masa pendudukan ini ; juga Jepang yang dihancurkan dan praktis diratakan oleh pemboman selama perang, sangat membutuhkan bantuan Amerika Serikat untuk membangun kembali negaranya. Akibatnya ialah bahwa Jepang harus menyesuaikan diri dengan Amerika Serikat yang dalam perang dingin memimpin dunia anti komunis. Dengan perkataan lain : Jepang masuk kubu anti – Komunis yang lebih dikenal sebagai kubu Barat yang berhadapan dengan dunia Komunis³.

Dalam konperensi Perdamaian San Fransisco, Indonesia menerima kerangka Perjanjian Perdamaian Amerika Serikat dengan lima tuntutan, dua diantaranya diterima yaitu pengakuan kedaulatan atas Jepang dan hak Indonesia untuk menuntut pampas an perang kepada Jepang⁴, yang pada tahun – tahun berikutnya memberi jalan perundingan Jepang – Republik Indonesia, yang akhirnya dibuka hubungan diplomatic secara resmi.

Dalam masa perundingan Jepang – Republik Indonesia tahun 1951 – 1958, politik dalam negeri Indonesia ditandai oleh ketidak – stabilan, terutama karena adanya pemberontakan – pemberontakan. Sementara itu Partai Komunis Indonesia (PKI) telah mulai tumbuh kembali di bawah pimpinan DN. Aidit yang menganut filsafat ‘jalan parlementer menuju sosialisme’. Pada awal pertengahan ke dua tahun 1950-an Presiden Sukarno mengkritik partai – partai politik dengan tajam disertai pengajuan konsep – konsep barunya yang menyarankan diikut sertakannya PKI dalam koalisi kabinet. Hal ini menimbulkan kebencian pemimpin – pemimpin anti PKI, terutama di luar pulau Jawa.

Kebencian tersebut meletus menjadi pemberontakan terbuka di Sumatera dan Sulawesi, kemudian pada bulan Maret 1957 Presiden Sukarno mengumumkan keadaan darurat perang yang mempercepat politisasi Tentara. Hal ini menandai semakin nyatanya ‘tri polar power’ antara Presiden Sukarno, PKI dan Tentara. Sampai saat itu perundingan pampas an perang Jepang – Indonesia belum membuahkan hasil. Salah satu unsure penyebabnya adalah ketidakstabilan politik Indonesia dan kenyataan berkembangnya Komunisme yang pesat, sehingga Jepang bersikap ‘wait and see’.

Amerika Serikat, bagaimanapun, tidak akan membiarkan Indonesia terbawa kea rah blok Komunis. Melalui perundingan pampas an perang Jepang – Indonesia, Amerika

³ Lie tek Tjeng, “Prospek Hubungan Jepang dan Indonesia : Suatu Proyeksi”, dalam Review Jepang, No. 4 Maret 1978, hal. 35.

⁴ Mashashi Nishihara, op.cit., hal. 36

Serikat berusaha menggunakan pengaruhnya untuk mendekatkan Indonesia dan Jepang, kemudian menarik Indonesia ke dalam orbitnya. Perundingan yang berlarut – larut antara Jepang – Indonesia, akhirnya menghasilkan persetujuan pembayaran pampasan perang Jepang kepada Indonesia sebesar US \$ 223.080.000 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam jangka waktu dua belas tahun. Perjanjian perdamaian tersebut ditanda-tangani pada tanggal 20 Januari 1958⁵. Hasil persetujuan ini, nampaknya, Jepang lebih menitik beratkan pada pertimbangan ekonomi dari pada pertimbangan politik saat itu.

Pada tanggal 15 Februari 1958, kaum pemberontak yang terdiri dari beberapa perwira dan politisi dari Masyumi dan partai Sosialis Indonesia (PSI) mengumumkan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat. Hubungan Republik Indonesia – Amerika Serikat menjadi tegang, Presiden Sukarno menuduh Amerika Serikat secara diam – diam membantu pemberontak. Di samping itu, Amerika Serikat memperlihatkan keengganannya menyokong perjuangan Indonesia di PBB dalam sengketa Irian Barat, pada awal sengketa.

Sikap Amerika Serikat ini merupakan salah satu sebab kecenderungan Presiden Sukarno lebih dekat kepada Uni Soviet, akibatnya timbul kesan bahwa Indonesia telah masuk ke blok Komunis; walaupun pada akhirnya, dalam masalah sengketa Irian Barat, Amerika Serikat berhasil membawa Republik Indonesia dan Belanda menuju ke meja perundingan. Nampaknya Amerika Serikat masih yakin mampu mencegah kecenderungan Presiden Sukarno lebih dekat kepada blok Komunis.

Namun, sebuah krisis baru timbul, yaitu Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang di sponsori oleh Inggris, sebuah Negara sekutu terdekat Amerika Serikat. Di samping itu, sejak tahun 1962 Presiden Sukarno mulai menyerang Kapitalisme Barat dan lembaga – lembaga demokrasi Barat serta mengemukakan kebaikan – kebaikan demokrasi Terpimpinnya⁶. Keadaan demikian mengkhawatirkan beberapa pihak, terutama

⁵ Hasil perjanjian Jepang – Republik Indonesia, lihat pewarta kemlu, No, 2, Tahun ke IV, Februari 1958.

⁶ Donald Wilhelm, “Emerging Indonesia”, Suli Suleiman (Pentj.), Indonesia Bangkit, UI-Press, Jakarta, 1981, hal. 39

bagi Amerika Serikat. Keadaan ini bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Jepang.

Pada awal tahun 1960-an pengaruh Amerika Serikat di Indonesia semakin berkurang sementara kecenderungan Presiden Sukarno kepada blok Komunis semakin nyata. Ketegangan Indonesia dengan Negara – Negara Barat tidak banyak mempengaruhi Jepang untuk mengambil sikap yang berlawanan, Jepang dan Indonesia tetap melaksanakan perjanjian pembayaran pampasan perang, walaupun prakteknya tidak persis seperti rencana yang dicanangkan.

Sementara Amerika Serikat kehilangan legitimasinya di Indonesia, China melakukan usaha pendekatannya terhadap Indonesia dengan kunjungan – kunjungan pejabat – pejabat tingginya dan menggunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi PKI agar berpihak kepadanya dalam perselisihan Peking – Moskow. Akhirnya pada bulan Desember 1964 ketua CC PKI mengumumkan tidak akan menghadiri Konferensi ‘Comunist and Workers Parties’ di Moskow yang menurut rencana akan dimulai pada tanggal 1 Maret 1965, dikarenakan kurang persiapan. Namun diduga keras alasan yang sebenarnya dan sangat mungkin adalah karena PKU pada saat itu telah mantab dan matang dalam pilihannya antara Moskow dan Peking⁷.

Mulailah babak hubungan baik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China. Tercermin dalam isi pidato kenegaraan Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1965 yang menyatakan adanya poros anti imperialisme ‘Jakarta – Pnompenh – Hanoi – Peking – Pyongyang’ yang dianggap sebagai keharusan sejarah perjuangan bangsa – bangsa Asia dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Keadaan ini, jelas, membahayakan strategi global Amerika Serikat, dan lebih mengerikan strategi global Amerika Serikat bila terbentuk suatu pemerintahan komunis di Indonesia yang pro Peking.

Masalah Malaysia mulai menghangat pada tahun 1963, ketika Tengku Abdul Rahman meresmikan terbentuknya Federasi Malaysia pada bulan September. Presiden Sukarno dengan dukungan PKI sepenuhnya, Republik Rakyat China dan Negara – Negara blok Komunis yang lain melancarkan ‘Kampanye Ganyang Malaysia’. Sementara

⁷ Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Malaysia disponsori oleh Inggris, Australia, Selandia Baru dan sekutu – sekutunya yang lain, termasuk Amerika Serikat dan Jepang.

Masalah Malaysia merefleksikan aspek – aspek antagonistic antara blok Barat dan blok Timur yang saling berebut pengaruh. Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, Australia dan sekutu – sekutunya termasuk Jepang pada kubu Barat; dengan Republik Rakyat China, Indonesia, Uni Soviet, walau dukungannya tidak sepenuh RRC, dan Negara – Negara sekutunya pada kubu Timur. Kondisi demikian menempatkan Republik Indonesia dan Jepang dalam posisi yang tidak menguntungkan, masing – masing pada blok yang saling bersaing berebut pengaruh.

Namun demikian, walaupun hubungan Jepang – Republik Indonesia pada waktu itu belum memiliki prospek yang baik dan diwarnai oleh perbedaan – perbedaan yang cukup mendasar dalam posisi yang tidak menguntungkan; hubungan Jepang – Republik Indonesia cukup baik dibandingkan dengan hubungan Amerika Serikat – Republik Indonesia atau dengan Negara – Negara blok Barat yang lain. Jepang merupakan bangsa pro – Barat satu – satunya yang tetap memelihara hubungan bersahabat dengan Indonesia selama periode 1963 – 1966, seperti dinyatakan oleh Masashi Nishihara bahwa Japan was the only pro – Western nation who retained friendly relations with Indonesia during this period . . .⁸

Yang menarik untuk diteliti dan sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ‘apakah latar belakang yang mendorong Jepang dalam hubungannya dengan Republik Indonesia pada periode 1958 – 1966’.

3. Tujuan Penelitian.

Suatu penelitian akan menunjukkan hasil yang lebih baik bila tujuannya jelas. Dalam kesempatan ini di paparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

3.1 Mengetahui sikap dan tingkah laku Jepang dalam hubungan internasional, terutama pada periode sesudah perang dunia II, mengingat bangsa Jepang yang merupakan raksasa militer pada periode sebelum periode perang dunia I dan berubah menjadi raksasa ekonomi pada periode setelah perang dunia II yang sama – sama perlu diwaspadai.

⁸Masashi Nishihara, op.cit., hal. 197.

- 3.2 Mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan social, khususnya ilmu hubungan internasional.
- 3.3 Mengajak semua pihak yang berminat untuk mengkaji yang selanjutnya menemukan dan memecahkan masalah – masalah dalam hubungan internasional, khususnya hubungan Jepang – Republik Indonesia.
- 3.4 Menambah perbendaharaan bacaan bagi masyarakat, khususnya kalangan Perguruan Tinggi.

4. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 4.1 Menambah data tentang Jepang sehingga dapat dimanfaatkan baik bagi para peneliti tentang Jepang dalam aspek – aspek yang lain maupun bagi para peminat praktis dalam berhubungan dengan Jepang.
- 4.2 Mengetahui sikap dan tingkah laku Jepang dalam berhubungan dengan Negara – Negara lain, khususnya Indonesia, sehingga dapat diimbangi dengan sikap dan tindakan yang saling menguntungkan.
- 4.3 Memberikan gambaran ekspansionis Jepang, latar belakang dan motivasinya.

5. Studi Kepustakaan.

Sebuah Negara, tidak ubahnya seperti sebuah keluarga, memerlukan barang – barang untuk mempertahankan kehidupan seluruh anggotanya, membela diri dari bahaya, meningkatkan harga diri dan sebagainya. Untuk mencapai hal – hal tersebut tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan Negara – Negara tetangga. Dalam hubungan internasional setiap Negara akan mendasarkan pada ‘national interest’-nya masing – masing.

Jepang sebuah Negara yang baru diberi kemerdekaan penuh kembali pada tahun 1952, setelah selama tujuh tahun mengalami masa pendudukan, mulai menormalisir hubungannya dengan Negara – Negara tetangga. Normalisasi hubungannya, terutama, dalam rangka mempertahankan eksistensinya yang pada hakikatnya adalah mencapai national interest. Juga dalam rangka itulah Jepang menjalin hubungan dengan Republik

Indonesia yang diawali dengan perundingan pampas an perang, tahun 1951, dan secara resmi hubungan diplomatic Jepang – Republik Indonesia dimulai pada tahun 1958.

National interest dijelaskan sebagai ‘the fundamental objektive and ultimate determinant that guides the decision makers of a state ini making foreign policy’⁹. Sedangkan WW. Rostow mengatakan bahwa ‘national interest is the conception which nations apply in trying to influence the world environment to their advantage’¹⁰. Menurut Padelford and Lincoln, kepentingan nasional dapat diidentifikasi ke dalam empat kategori pokok, yaitu :

1. National security.
2. Economic Welfare and Advancement.
3. The Safeguarding or Argumenting of national Power in Relation to other state¹¹.

Konsep – konsep kepentingan nasional tersebut mempunyai tekanan berbeda – beda yang saling melengkapi. Untuk menganalisa ‘apakah latar belakang yang mendorong Jepang dalam hubungannya dengan Republik Indonesia pada periode 1958 – 1966’ kiranya konsep ini cukup memadai. Dalam pembahasan lebih lanjut guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, nampaknya lebih tepat untuk menekankan pada identifikasi kepentingan nasional aspek ‘economic welfare and advancement’ dari Padelford dan Lincol, walaupun aspek – aspek yang lain tidak sama sekali terlepas.

Selanjutnya untuk mendukung pembahasan lebih lanjut diteliti literature – literature yang berhubungan dengan tingkah laku Jepang dalam politik internasional pada umumnya dan di Asia Timur dan Asia Tenggara pada khususnya, terutama yang berhubungan dengan Indonesia. Literature – literature tersebut dapat dilihat dalam daftar pustaka.

6. Hipotesa.

⁹ Jack C. Plano and Roy Olton, The International Relations Dictionary, Holt, Rinehart, and Winston Inc., 1969, hal. 128.

¹⁰ Padelford and Lincoln, The Dinamics of International Politics, The Macmillan Company, New York, 1967, hal. 128.

¹¹ Padelford and Lincoln, ibid., hal. 196

Seperti dikemukakan oleh Winarno Surahmat¹², bahwa hipotesa merupakan jawaban sementara yang kemungkinannya menjadi jawaban yang benar. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diajukan hipotesa sebagai berikut :

Latar belakang yang mendorong Jepang dalam hubungannya dengan Republik Indonesia pada periode 1958 – 1966 adalah, terutama, keinginan Jepang memanfaatkan sumber – sumber alam Indonesia untuk kepentingan industrialisasi dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.

6.1 Variabel independen.

Adanya politik ekspansionis Jepang yang dilandasi oleh sikap pengabdian pada profesi yang sangat tinggi. Petualangan internasional Jepang cukup mengagumkan, baik petualangan militer maupun petualangan ekonominya. Petualangan ini didukung oleh kondisi fisik Jepang yang miskin.

Indicator yang mendukung variabel ini adalah kenyataan keadaan fisik Jepang yang sangat miskin. tanahnya hanya enam belas persen dapat di tanam, hampir seluruh barang – barang mineral harus diimpor dari luar negeri, juga bahan – bahan pangan,. Keadaan ini menjadikan Jepang hanya hidup dengan lingkungan internasionalnya; dengan kata lain memanfaatkan Negara – Negara tetangganya, termasuk Indonesia.

6.2 Variabel dependen.

Sejak restorasi Meiji Jepang telah mampu melihat wilayah Asia Tenggara sebagai wilayah yang subur yang juga diperkirakan banyak mengandung barang – barang mineral sebagai bahan baku industry. Industry Jepang yang telah maju bersama – sama dengan Negara – Negara Barat, keadaan alamnya yang miskin dan pengaruh imperialisme Barat membawa Jepang menjadi ekspansionis untuk mendapatkan barang – barang yang tak dimilikinya.

Variabel ini di dukung oleh adanya indicator riil bahwa wilayah Asia Tenggara adalah wilayah yang cukup subur dan banyak mengandung bahan – bahan mineral. Disamping itu, penduduknya belum maju dan tidak terbentuk menjadi satu kesatuan politik yang kuat, pada masa sebelum perang dunia II seluruh Negara – Negara Asia Tenggara,

¹² Winarno Surahmat, Paper, Thesis, Disertasi cv. Tarsito, Bandung, 1974, hal.25.

kecuali Thailand, dijajah oleh bangsa Barat. Keadaan ini mendorong Jepang untuk menguasai wilayah ini, baik sebelum perang dunia II maupun sesudahnya, dengan kekuatan militer maupun dengan diplomasi.

7. Konsep Operasional.

Kepentingan nasional yang mendorong tingkah laku dalam hubungan internasional sangat nampak pada tingkah laku Jepang yang pragmatis oportunistis. Dalam hubungannya dengan Negara – Negara tetangganya, Jepang tidak melihat perbedaan – perbedaan yang prinsipil yang menjadi kendala dalam hubungan internasional. Sikap ini menjadikan Jepang luwes dalam hubungan internasional.

Dalam hubungannya dengan Indonesia, Jepang tidak terpengaruh oleh posisi keterkaitan dengan Amerika Serikat yang membawanya dalam kubu anti Komunis. Sedangkan Indonesia pada saat – saat dibuka hubungan diplomatic dengan Jepang yang selanjutnya diteruskan dengan proses pembayaran pampasan perang dalam posisi dekat dan dapat dikatakan di blok Komunis. Tetapi hubungan kedua Negara tetap terjaga baik, sementara Negara – Negara blok Barat menjauhkan diri dari Indonesia, Jepang tetap berhasil menjaga hubungannya dengan baik.

Keadaan di atas terjadi karena Jepang memang tidak terlalu berkepentingan dengan ideology, bagi Jepang yang penting adalah kepentingan nasional yang berarti sumber – sumber alam. Lagi pula militer Jepang sama sekali tidak dapat diandalkan lagi, dengan demikian satu – satunya jalan adalah diplomasi baik dengan kawan maupun lawan.

Penelitian ini akan menguraikan lebih luas tentang sikap dan tingkah laku Jepang dalam hubungan internasional, terutama dengan Indonesia, yang dapat dianggap mewakili bentuk – bentuk hubungan Jepang dengan Negara – Negara yang belum maju.

8. Metodologi.

Suatu penelitian yang menggunakan beberapa metode penelitian secara terpadu dimungkinkan menghasilkan karya yang lebih sempurna dan lebih baik. Mengingat terbatasnya pendanaan dan waktu, maka penelitian ini hanya akan menggunakan metode

penelitian literature, studi kepustakaan. Namun demikian hasil penelitian ini sejauh mungkin diusahakan memenuhi criteria ilmiah.

BAB II PERUNDINGAN PAMPASAN PERANG